

Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Elektronik kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Banjarnegara

Electronic-based Agency Performance Accountability System Training for Banjarnegara Regional Government Organizations

Dimara Kusuma Hakim

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Sains

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. Raya Dukuh Waluh, Kembaran 53182, Indonesia.

email: dimarakusumahakim@gmail.com

DOI:10.30595/jpts/v%i%.xxxx

ABSTRAK

E-SAKIP, atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja instansi pemerintah. Dalam era digital saat ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pemerintah merespons tuntutan ini dengan membangun E-SAKIP, sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah secara elektronik. Dalam rangka pelaksanaan AKIP, dilakukan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah, untuk pemantauan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah dalam rangka mengukur capaian tujuan, sasaran, indikator, target, dan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah difusi ilmu pengetahuan dan teknologi (DIPT), yaitu suatu proses penyebaran dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melibatkan interaksi antara sumber, saluran, dan penerima. DIPT dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) kesadaran, (2) penilaian, (3) adopsi, dan (4) penguasaan. Dalam setiap tahap, peserta pelatihan mendapatkan informasi, demonstrasi, latihan, dan bimbingan dari para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kesimpulan dari pelatihan ini adalah bahwa kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peserta pelatihan merasa mendapatkan manfaat dari pelatihan ini dan berkomitmen untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang didapat di instansi masing-masing. Pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kata Kunci: *SAKIP, e-Government, analisis kinerja, e-SAKIP*

ABSTRACT

E-SAKIP, or Government Agency Performance Accountability System, was built in response to demands for transparency and accountability in the performance of government agencies. In the current digital era, society increasingly demands transparency and accountability from the government in carrying out its duties and functions. Therefore, the government responded to this demand by building E-SAKIP, a system that allows the public to monitor and evaluate the performance of government agencies electronically. In the context of implementing AKIP, training is carried out to increase the understanding and skills of local government officials in monitoring and evaluate the performance of local government agencies, for monitoring and evaluating the performance of local government agencies in order to measure the achievement of goals, targets, indicators, targets, and strategies. Has been determined in regional development planning. The method used in this training is the diffusion of science and technology (DIPT), a process of spreading and applying science and technology involving interactions between sources, channels, and recipients. DIPT is carried out through four stages, namely: (1) awareness, (2) assessment, (3) adoption,

and (4) mastery. At each stage, training participants receive information, demonstrations, exercises, and guidance from resource persons who are competent in their fields. The conclusion from this training is that the training activities have been carried out well and by the expected objectives. The training participants felt they had benefited from this training and were committed to applying the knowledge and skills they gained in their respective agencies. It is also hoped that this training can improve the quality of public services and regional development.

Keywords: SAKIP, e-Government, performance analysis, e-SAKIP

1. Pendahuluan

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Kemenpan-RB, 2021; Suharyanto, 2016). SAKIP dirancang sebagai rangkaian sistematis atas berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

E-SAKIP, atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja instansi pemerintah. Dalam era digital saat ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pemerintah merespons tuntutan ini dengan membangun E-SAKIP, sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah secara elektronik (Kemenpan-RB, 2024; Radinda & Saleh, 2021; Sasmita et al., 2018).

Dengan E-SAKIP, proses pemantauan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah menjadi lebih efisien dan transparan. Masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana instansi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya, dan apakah mereka telah memenuhi target yang telah ditetapkan (Bappeda, 2021). Selain itu, E-SAKIP juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan kinerja pemerintah, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, E-SAKIP berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelatihan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan solusi penting dalam implementasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dengan adanya pelatihan akan memberikan pembekalan bagi para peserta dalam menyelenggarakan SAKIP, termasuk penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, penyusunan indikator kinerja, pelaporan kinerja, revidi LAKIP dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, pelatihan SAKIP dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Radinda & Saleh, 2021; Utami, 2018).

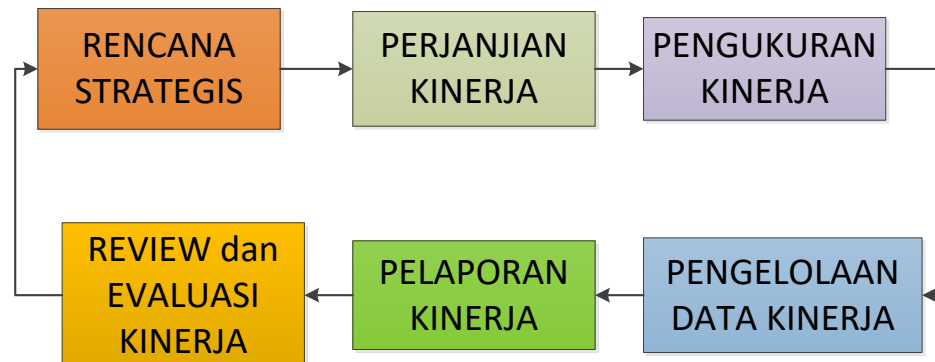
Selain itu, pelatihan SAKIP juga membantu dalam meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif. Peserta pelatihan diajarkan untuk memahami dan menguasai konsep dasar SAKIP, serta menerapkan nilai-nilai Core Value ASN. Oleh karena itu, pelatihan SAKIP menjadi solusi penting dalam mewujudkan AKIP yang efektif dan efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Metode

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iffah & Ma'arif, 2012) dengan menyebarluaskan dan memfasilitasi

penggunaan aplikasi e-SAKIP kepada para staf instansi pemerintah dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang wajib melaporkan kinerjanya. Metode ini dilakukan dengan cara menyediakan akses aplikasi e-SAKIP, memberikan bantuan teknis, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi tersebut.

Materi pelatihan yang diberikan sesuai alur pada Gambar 1, yaitu: input data Renstra, cetak PK, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data, Pelaporan, Review dan Evaluasi.



Gambar 1. Tahap Pelatihan

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi E-SAKIP merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. E-Sakip adalah singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja pemerintah. E-Sakip memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, target, dan capaian kinerja instansi pemerintah. E-Sakip juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Pelatihan ini ditujukan untuk semua OPD di Kabupaten Banjarnegara. Pelatihan dilaksanakan secara offline selama dua hari. Adapun tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi staf OPD dalam menyusun data AKIP dengan memanfaatkan teknologi informasi. Acara pelatihan dimulai dengan sambutan dari Kepala Bagian Organisasi: Turno, SIP (Gambar 2 & 3), lalu dilanjutkan paparan oleh narasumber (Gambar 4,5 & 6): Dimara Kusuma Hakim, S.T., M.Cs., dan input data oleh peserta (Gambar 7 & 8).



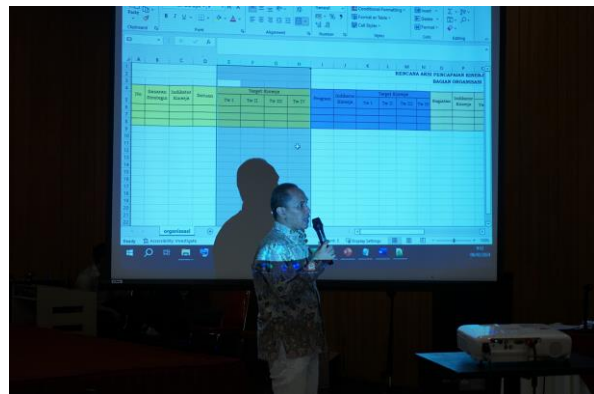
Gambar 2. Suasana Pelatihan



Gambar 3. Sambutan Kepala Bagian Organisasi



Gambar 4. Penjelasan awal dari Narasumber



Gambar 5. Penjelasan Teknis SAKIP



Gambar 6. Penjelasan Teknis E-SAKIP



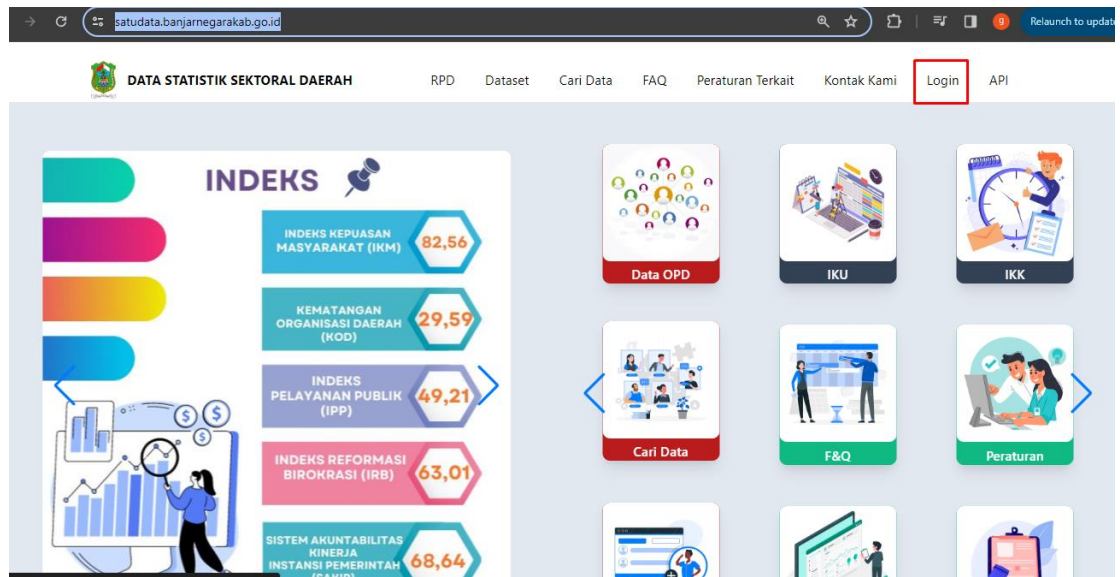
Gambar 7. Input Data



Gambar 8. Suasana Pelatihan

Peserta pelatihan diperkenalkan dengan aplikasi E-SAKIP, cara login, dan fitur-fitur dasarnya. Peserta melakukan input data Tujuan, Sasasan dan Indikator untuk Daerah dan OPD, serta data Kegiatan berikut Sub Kegiatan.

Untuk mengisi data E-Sakip, dilakukan akses ke situs Satu Data Banjarnegara (<https://satudata.banjarnegarakab.go.id/>) dan memilih menu e-SAKIP (Gambar 9).



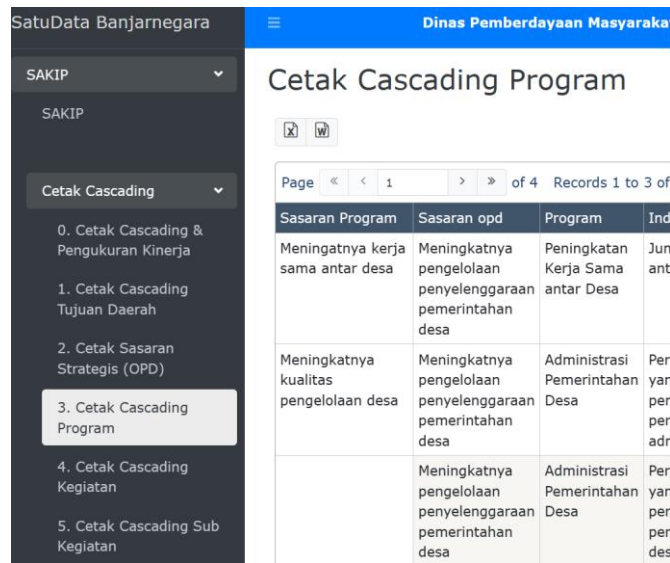
Gambar 9. Akses aplikasi E-Sakip pada Satu Data Banjarnegara

Input data SAKIP diawali dengan Input Data Daerah, lalu data OPD, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Tampilan awal adalah: Tujuan, Sasaran, dan Indikator Daerah, dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Detail informasi berikutnya dapat terlihat ketika tombol di-klik (misalnya: Tujuan OPD) pada Gambar 10.



Gambar 10. Entri Data

Setelah input data SAKIP selesai dilakukan, dapat dilakukan cek ulang pada menu “Cetak Cascading”, dengan memilih informasi: Daerah, OPD, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Gambar 11).



Gambar 11. Cetak Cascading

Surat Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicetak pada menu Cetak PK, sesuai Eselon. Pada fasilitas ini terdapat beberapa Lampiran PK.



Gambar 12. Perjanjian Kinerja

Pengukuran Kinerja dan Rencana Aksi dapat diakses pada menu Cascading 0 (Gambar 13). Masing-masing tombol cetak dibagi dalam beberapa bagian Pengukuran Kinerja (Triwulan 1,2,3, & 4) dan Rencana aksi (OPD, program, kegiatan dan Sub kegiatan).



Gambar 13. Pengukuran Kinerja dan Rencana Aksi

4. Kesimpulan

Acara pelatihan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Pelatihan ini diikuti oleh semua OPD di Kabupaten Banjar Negara. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi OPD dalam memberikan informasi kinerja perangkat daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Hasil evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa peserta pelatihan merasa puas dan mendapatkan manfaat dari materi dan metode yang disampaikan oleh para narasumber. Peserta pelatihan juga berkomitmen untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang didapat dari pelatihan ini di instansi. Semoga pelatihan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas AKIP di Kabupaten Banjarnegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada:

- Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
- Bagian Organisasi Kabupaten Banjarnegara

- Semua OPD yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. (2021). *Peran E-SAKIP Dalam Mengakselerasi Akuntabilitas Kinerja Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://bappeda.babelprov.go.id/content/peran-e-sakip-dalam-mengakselerasi-akuntabilitas-kinerja-di-pemerintah-provinsi-kepulauan>
- Iffah, J. D. N., & Ma'arif, S. (2012). Metode Difusi Ipteks dalam Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Katemas Kabupaten Jombang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JP-Mas) STKIP PGRI JOMBANG*, 38–42. <https://core.ac.uk/download/267900372.pdf>
- Kemenpan-RB. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/196187/Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.pdf>
- Kemenpan-RB. (2024). *Kementerian PANRB Perkenalkan Wajah Baru e-SAKIP Reviu*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-perkenalkan-wajah-baru-e-sakip-reviu>
- Radinda, R., & Saleh, S. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Jaringan Internet E-SAKIP Terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)(Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 12, 1029–1034.
- Sasmita, P. A. G., Cahyadi, M. F., Andriyani, N. F. S., Mutiari, K. N., & Sriasih, N. P. (2018). Pengelolaan Manajemen Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Dinas Dengan Menggunakan Sistem Terpadu Berbasis E-Sakip (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Kab. Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).
- Suharyanto, A. (2016). *Pengawasan Internal Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Utami, G. S. (2018). *Panduan kegiatan pelatihan teknis SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan Kemendikbud angkatan II tahun 2018*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://repository.kemdikbud.go.id/18145/>